



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126  
Semarang 50243

Semarang, 3 November 2021

Nomor : 180/0015271  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014 dan Nomor 66 Tahun 2017.

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

di -

S E M A R A N G


Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan arahan Menteri Dalam Negeri terkait produk hukum daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak Dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan produk hukum daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya khususnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
2. Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014 dan Nomor 66 Tahun 2017 dimaksud telah dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi oleh Biro Hukum Setda bersama Instansi dan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada tanggal 19 Oktober 2021.
3. Berdasarkan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2017 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara melakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud dengan berpedoman kepada hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana terlampir serta mengoordinasikan dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

  
SUMARNO SE., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 199202 1 001 *My*

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 180/0015271

PERIHAL : HASIL PENKKAJIAN ANALISIS DAN  
EVALUASI TERHADAP PERATURAN  
GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 65 TAHUN 2014 dan NOMOR  
66 TAHUN 2017

HASIL PENKKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SURVEY KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DAN PENTAHAPAN  
PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DAN  
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 66 TAHUN 2017  
TENTANG PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

- A. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Survey Kebutuhan Hidup Layak Dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak Dan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan produk hukum daerah yang terdampak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- B. Beberapa susbtansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014 yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 antara lain terkait :
1. Pelaksanaan pengupahan oleh Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat;
  2. Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun berdasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan variable tertentu yaitu paritas daya beli,tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah yang datanya bersumber dari lembaga yang berwenang dalam bidang statistik
- C. Beberapa susbtansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2017 yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 antara lain terkait:
1. Isitilah pinjam pakai Kawasan hutan diatur dengan istilah persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
  2. Persetujuan penggunaan Kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada Gubernur untuk luasan tertentu dengan peruntukan pembangunan fasilitas umum yang bersifat non-komersial dan pertambangan;
- D. Terkait dengan penyelenggaraan kewenangan dibidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat disusun Rancangan Peraturan Gubernur sesuai kebutuhan Oganisasi Perangkat Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara terinci dalam bentuk matrik sebagaimana terlampir sebagai pedoman untuk diperhatikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2017 dimaksud serta mengoordinasikan pencabutan dimaksud dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



SUMARNO, SE., M.M  
Pembina Utama Muda



NIP. 19700514 199202 1 001